Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Diah Sari Pangestuti

diah_sp@yahoo.co.id | Pondok Pesantren Darul Huda
Mayak Tonatan Ponorogo

Abstract: Looking at the crime statistic, it shows the continuous increase of crime either in number and quality. Even more varied and creative. Therefore, in order to produce internal security and to maintain the wellbeing of the people, a special institution is needed to handle it, namely the Police Agency. By using normative legal research and combining it with an analytical approach in order to analyze the data descriptively and inductively, this study tries to determine the role of the Police agency based on Fiqh Siyasah. It is concluded that: firstly, in Indonesian, there is a Police Agency that is a state instrument that plays a role in maintaining public order and security, enforcing the law, providing protection and services to the public. Secondly, in Islamic Law, there is the *Muhtasib* Institution, which has a supervisory and controlling body. Thirdly, that the Police in Islamic and Indonesian Law has almost the same duties that are as law enforcement to maintain security and public order. However, because of the law in Islam covers both *mu'amalah* and 'ubudiyyah aspects, so the scope of police responsibility in Islam is broader.

Keywords: Role of Police Department and Muhtasib Institution

Abstrak: Dewasa ini kejahatan terus mengalami peningkatan serius, baik secara statistik maupun kualitasnya. Bahkan semakin variatif dan kreatif. Oleh karena itu, demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang menanganinya, yaitu Lembaga Kepolisian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative lalu menganalisa datanya secara deskriptif induktif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Kepolisian ditinjau dari Fiqh Siyasah. Di bagian akhir disimpulkan bahwa: *pertama*, dalam Hukum Indonesia terdapat Lembaga Kepolisian, yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, dalam Hukum Islam terdapat Lembaga *Muhtasib*, yang merupakan lembaga pengawas dan pengendali. *Ketiga*, bahwa Kepolisian dalam Hukum Islam dan Indonesia mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi *mu'āmalah* maupun *'ubūdiyyah*, sehingga cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas.

Kata Kunci: Peran lembaga kepolisian dan peran lembaga *muhtasib*

Pendahuluan

Masyarakat modern yang serba kompleks, merupakan produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Tidak mudah bagi sebagian besar masyarakat untuk beradaptasi dengan kehidupan yang begitu kompleks, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai macam masalah sosial. Maka, jika tanpa didasari dan dibentengi iman yang kuat, tidak jarang muncul perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum sehingga mengganggu serta merugikan orang lain. Dalam konteks inilah, para kriminolog menyebutnya sebagai “kejahatan”, yaitu suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹

Sejak zaman Jahiliyah hingga era modern, penyakit masyarakat selalu ada di kehidupan sosial masyarakat, baik dari segi kuantitas atau kualitasnya. Bisa berkurang atau bahkan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada kondisi masyarakat Jahiliyah, di mana dekadensi moral begitu tampak, yakni banyaknya pelecehan terhadap kaum perempuan. Di antaranya adalah pembunuhan dan penguburan hidup-hidup terhadap bayi perempuan yang

¹ Nafi' Mubarak, “Pidana Qiṣās dalam Prespektif Penologi,” *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (Desember 2017): 224.

baru lahir, karena pada masa itu bayi perempuan dianggap sebagai aib bagi orang tua.²

Tidak hanya itu, beberapa lelaki menyetubuhi seorang wanita secara bergantian. Jika wanita tersebut hamil dan melahirkan anaknya, maka beberapa lelaki yang menyetubuhinya dikumpulkan dan dipilih satu diantara mereka sebagai ayah dari bayi tersebut. Yang lebih parah adalah seorang wanita bisa diwariskan kepada anak lelakinya ketika suaminya meninggal.³ Dari fakta tersebut, tampak jelas bagaimana gambaran kehidupan masyarakat Jahiliyah yang memiliki moral yang sangat buruk, di mana sebagian masyarakat hidup dengan kehinaan dan intimidasi.

Dalam konteks modern, kejahatan juga mengalami peningkatan serius. Tak salah jika dikatakan bahwa meskipun sudah mendapatkan reaksi social, namun secara statistik terus meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuknya juga semakin variatif dan cenderung "kreatif".⁴ Maka demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, diperlukan adanya Undang-undang atau hukum yang mengatur masyarakat. Khususnya hukum pidana.⁵

Di sisi lain, Polisi merupakan alat penegak hukum di Indonesia. Selain sebagai alat penegak hukum, polisi juga berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Kepolisian Negara RI juga memiliki kewenangan yang salah satu di antaranya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit

² Mahmud Mahdi al-Istambuli, *Wanita-wanita Sholihah dalam Cahaya Kenabian* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 12.

³ al-Istambuli, 13.

⁴ Mubarak, "Pidana Qiṣās dalam Prespektif Penologi," 224.

⁵ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 4.

⁶ Ach Choirul Anam, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Prespektif Maqasid al-Syari'ah," *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015): 13.

masyarakat.⁷ Begitu luas tugas kepolisian hingga hampir di segala aspek kehidupan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab polisi.⁸

Di Indonesia, Lembaga Kepolisian Negara merupakan alat penegak hukum yang memiliki kedudukan langsung di bawah presiden dan sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden sesuai UU Kepolisian Negara pasal 37 (1).⁹ Lembaga ini mempunyai beberapa tugas pokok sesuai pasal 13 UU Kepolisian Negara, berbunyi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal tersebut akan terlihat kehadiran anggota Polri di tengah-tengah masyarakat pada dasarnya mengemban tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat baik terhadap pengunjung rasa maupun terhadap masyarakat sekitarnya termasuk menjaga kewibawaan pemerintah dengan mengawal proses demokratisasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰

Di sisi lain, terdapat asumsi bahwa keamanan dalam negeri merupakan salah satu indikator dari kemajuan suatu negara. Ini menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh banyak pihak. Apalagi tantangan globalisasi yang semakin berkembang juga diikuti dengan tantangan permasalahan kejahatan seperti *organized crime*, *religious fanaticism*, korupsi dan sebagainya.¹¹

⁷ Undang-undang Kepolisian Negara Pasal 1 yang berbunyi: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang. (pada poin c. berbunyi) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

⁸ Agus Rahardjo dan Angkasa, "Profesionalisme dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (September 2011): 395.

⁹ UU Kepolisian Pasal 37 (1) berbunyi : Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

¹⁰ Sukardi, "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 4 (2016): 444.

¹¹ Sarah Nuraini Siregar, "Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri," *Jurnal Penelitian Politik* 5, no. 1 (2008): 47.

Latar belakang yang demikian inilah yang menggugah keinginan penulis untuk meneliti masalah tersebut. Fokus kajiannya pada peran Lembaga Kepolisian ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Metode Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, sehingga bersifat kepustakaan. Oleh karena itu, dalam menghimpun data penulis menggunakan teknik dokumentasi, berupa pencatatan, *recording*, dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, data yang diperoleh dilakukan pengolahan dengan cara *editing* dan *organizing*.

Berikutnya dalam menganalisis data digunakan teknik deskriptif induktif. Dimaksud deskriptif di sini adalah menggambarkan upaya-upaya kepolisisna dalam menangani penyakit masyarakat. Sedangkan dimaksud induktif di sini adalah menyesuaikan data-data yang telah diperoleh dari lapangan dengan konsep teori sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

Pengertian Polisi dalam Tatanegara Islam dan Indonesia

Istilah Polisi yang berlaku di Indonesia berasal dari istilah "*Politie*" yang digunakan di Belanda. Van Vollenhoven mengartikan "*Politie*" sebagai organ dan fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu organ pemerintah yang bertugas untuk mengawasi; kemudian polisi sebagai fungsi yang artinya, polisi menjalankan fungsi atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan. Dalam pengawasan jika perlu menggunakan paksaan demi terciptanya ketertiban umum.¹²

Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan

¹² Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), 2-3.

sebagainya).¹³ Di Indonesia, polisi adalah organ negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beranjak dari tugas tersebut, dalam pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah *ḥisbah* atau *syurṭah*. *Ḥisbah* dan *syurṭah* merupakan nama kepolisian dalam tatanegara Islam.¹⁴ Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan *amar ma'rūf nahi munkar*.¹⁵ Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka *muḥtasib* wajib untuk menegurnya.

Al-Mawardi mendefinisikan *muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.¹⁶ Dalam QS. Āli 'Imrān (3): 104, Allah SWT. berfirman, yang artinya: "*an hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*"¹⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Tata Negara Islam dan Indonesia penegak hukum, penertib serta penjaga keamanan masyarakat mempunyai istilah yang berbeda. Di mana dalam Hukum Tata Negara Islam, organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah *muḥtasib* atau *shurṭah*.¹⁸ Adapun di Indonesia organ negara

¹³ R. Hartono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 124.

¹⁴ Marah Halim, "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* X, no. 2 (Pebruari 2012): 67.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9.

¹⁶ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 257.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 93.

¹⁸ Halim, "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam," 73.

yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi.

Perkembangan Lembaga Kepolisian di Indonesia

Dalam sejarah kepolisian di Indonesia, organisasi Polri seringkali mengalami perubahan sesuai perkembangan pemerintah Republik Indonesia dan dinamika masyarakat.

Perkembangan Lembaga Kepolisian di Indonesia tidak terlepas dengan sejarah kemerdekaan Indonesia yang merupakan awal terbentuknya pemerintahan RI. Pada Agustus 1945 bersamaan dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR), dibentuk juga Polisi Negara untuk mempertahankan hukum dan ketertiban setempat. Pada awal pembentukannya, kepolisian ini berstatus sebagai kabinet independen yang dipimpin oleh Kepala Polisi Nasional.¹⁹

Sedangkan menurut Sarah Nuariani Siregar, bahwa secara historis Kepolisian Republik Indonesia lahir sebagai bagian dari institusi pemerintah pada tanggal 1 Juli 1946. Pada masa tersebut fungsi kepolisian belum terfokus pada masalah ketertiban masyarakat karena kondisi negara saat itu belum stabil pasca kemerdekaan. Tugas Polri lebih banyak melakukan penanggulangan penyelundupan atau penggelapan yang terkait dengan perkembangan ekonomi rakyat.²⁰

Hal itu tidak berlangsung lama, setelah kudeta PKI tahun 1966 semua angkatan bersenjata di Indonesia yang awalnya sebagai kabinet independen kemudian diubah menjadi struktur berkomando tunggal pimpinan Presiden Soeharto. Pada masa itu struktur komando militer tersentralisasi yang mencakup kepolisian sebagai angkatan keempat ABRI, di mana penegakan hukum dan ketertiban menjadi fokus utama kepolisian; sedangkan pertahanan dan

¹⁹ Billveer Singh, *Dwi Fungsi ABRI: Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 30–31.

²⁰ Siregar, "Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri," 48.

keamanan menjadi landasan komponen militer (Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat). Oleh sebab itu, maka struktur ABRI (yang melibatkan Kepolisian) memiliki peran yang menentukan dalam urusan penegakan hukum dan ketertiban dalam negeri serta memiliki kecenderungan besar untuk terlibat politik dalam negeri.²¹

Di Indonesia, politik militer (ABRI) telah dipraktekkan sejak awal berdirinya Republik Indonesia, saat itu militer sudah mempunyai kecenderungan untuk berpolitik sebagai prajurit revolusioner. Kecenderungan ini semakin kuat ketika militer harus menghadapi krisis politik yang terjadi di dalam negeri, yang di antaranya adalah pertama, politikus sipil cenderung terpecah-pecah dan hanya memikirkan diri mereka dan kelompoknya; kedua, tindakan Jenderal Sudirman yang mampu menarik garis hubungan sipil-militer bahkan sampai tidak mau tunduk kepada otoritas sipil Soekarno. Karena lemahnya organisasi politik sipil serta keinginan ABRI untuk mengisi kekosongan birokrasi. Sehingga pada tanggal 1982 keluarlah UU No. 20 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, pada Pasal 26 dan 28 mengatur fungsi non-hankam ABRI, yang isinya adalah:²²

Pasal 26: "Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial."

Pasal 28 (1): "Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia."

²¹ Singh, *Dwi Fungsi ABRI: Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*, 39–43.

²² Indria Samego, ed., *Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwifungsi ABRI* (Bandung: Mizan Pustaka, t.t.), 93.

Pasal 28 (2): "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Angkatan Bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkuat ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, mengembangkan demokrasi pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional."

Sebagai kelanjutan UU No. 20 tahun 1982 tersebut telah dikeluarkan pula UU No. 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa prajurit ABRI mengemban Dwi Fungsi, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan yang ditambahkan dengan kekuatan sosial politik.²³ Dengan keluarnya kedua UU tersebut maka peran Dwi Fungsi ABRI telah mempunyai kekuatan hukum. ABRI tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, akan tetapi ABRI juga turut serta dalam menentukan kehidupan sosial politik di Indonesia.²⁴

Pada masa Orde Baru, setelah pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai ketua Presidium Kabinet merangkap Menteri Utama bidang Pertahanan Keamanan. Peran ABRI dalam kancah politik di Indonesia begitu kuat. Mereka mendominasi jabatan-jabatan penting, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah.²⁵

Selanjutnya, pada September 1982, dikeluarkan UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara yang mengatur mengenai pemisahan secara organisatoris atau struktural jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI. Departemen Pertahanan Keamanan dipimpin oleh seorang Menteri dan ABRI dipimpin oleh Panglima yang membawahi Markas Besar ABRI. Adapun tugas Menteri Pertahanan Keamanan terfokus kepada kebijakan pertahanan dan keamanan negara secara lebih menyeluruh. Sementara

²³ Samego, 95–96.

²⁴ Siregar, "Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri," 48.

²⁵ Samego, *Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwifungsi ABRI*, 106.

persoalan yang menyangkut ABRI, baik sebagai kekuatan sosial politik, menjadi lingkup wewenang dan tanggung jawab Panglima ABRI.²⁶ Selain itu dalam melaksanakan fungsi sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkuat ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan.²⁷

Pada tahun 1973 jumlah anggota ABRI yang duduk di kabinet sebanyak 13 orang, dan pada jabatan gubernur ABRI menempatkan 22 orang dari 26 propinsi. Di samping itu, mereka juga turut mendominasi jabatan-jabatan penting di pemerintahan daerah. Sedangkan pada tahun 1981 jumlah anggota ABRI yang duduk menjadi anggota kabinet berjumlah 20 orang. Di jajaran birokrasi terdapat 15 anggota ABRI yang menduduki jabatan sebagai sekretaris jenderal, 12 orang sebagai inspektorat jenderal, dan 25 orang sebagai direktorat jenderal.²⁸

Setelah semakin lama bergabung dalam ABRI, akhirnya pada era reformasi Polri mandiri (memisahkan diri dari ABRI) dengan konsep "Reformasi menuju Polri yang Profesional".²⁹ Inilah Reformasi kelembagaan Polri pertama kali, yang terjadi pada tahun 1999. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dimana posisi Polri yang semula di bawah Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).³⁰

Konsep tersebut mengandung komitmen pada diri Polri untuk melakukan pembenahan diri yang dimulai dari

²⁶ Samego, 102.

²⁷ Singh, *Dwi Fungsi ABRI: Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*, 39–43.

²⁸ Samego, *Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwifungsi ABRI*, 107.

²⁹ Pemisahan ini tak lepas bahwa secara definitif polisi merupakan lembaga negara yang melakukan operasi di bawah otoritas nasional atau idealnya di bawah kendali otoritas sipil politik negara tersebut. Lihat: Siregar, "Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri," 49.

³⁰ Sarah Nuraini Siregar, "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)," *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (Juni 2014): 139.

tataran internal dengan merubah etika, sikap dan perilaku kepolisian serta budaya pelayanan yang profesional guna menuju kinerja Polri yang lebih berkualitas. Hal ini diarahkan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat. Pada masa ini, kepolisian mulai memperbaiki dan berbenah diri.

Sebagai salah satu penegak hukum, perubahan paradigma kepolisian bergerak dalam dinamika masyarakat yang diliputi oleh gejolak politik, ekonomi, budaya, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu Reformasi birokrasi internal Polri saat ini, tidak bisa berjalan sendiri, tanpa dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat secara umum.³¹

Pada era reformasi ini Polri lebih terfokus pada pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat, tidak ikut serta dalam percaturan politik (netral). Sebagai lembaga pemerintah yang otonom, Polri dapat mengambil kebijakan tanpa pengaruh dari lembaga lain. Sehingga dapat dengan leluasa bergerak dan berkembang dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Oleh karena itu, yang diperlukan Polri bukan sekedar melakukan reposisi dan re-organisasi, melainkan juga re-evaluasi, reorientasi dan redefinisi peran, dengan senantiasa menempatkan otoritas hukum serta keamanan masyarakat yang dilayani dan dilindungi, sebagai utamanya.³²

Mengenai susunan atau jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah telah diatur dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 7 tahun 2002, yang menjelaskan bahwa:³³

1. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan.

³¹ Sukardi, "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi," 444.

³² Siregar, "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)," 135.

³³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, 160.

2. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)
3. Organisasi Polri di tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara RI Daerah (Polda).

Untuk menuju kepolisian yang modern lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani maka perjenjangan organisasi kepolisian perlu disederhanakan sehingga tidak terkesan berbelit-belit dan dapat langsung menyentuh masyarakat. Oleh karena itu, maka ditambahkan Kepolisian Wilayah (Polwil), Kepolisian Kabupaten/Kota (Polres/Polresta), serta pos-pos polisi di tingkat kelurahan/desa yang kemudian menyentuh pada keamanan tingkat RW, RT atau dusun. Serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pembinaan dan kemitraan serta *community policing*.³⁴

Dari sini tampak jelas bahwa lambat laun, Polri sebagai alat penegak hukum dan sekaligus pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Di antaranya adalah dengan keluarnya Polri dari ABRI yang dulu memiliki dua fungsi yakni hankam dan sospol, kini Polri merupakan lembaga otonom yang abdi masyarakat dan netral, serta berada langsung di bawah presiden.

Perkembangan Lembaga Kepolisian dalam Pemerintahan Islam

Negara Madinah merupakan Negara Islam pertama pimpinan nabi Muhammad. Berdirinya negara Islam tersebut ditandai dengan adanya *baiat al-'aqabah* yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Mereka menyerahkan tonggak kepemimpinan kepada nabi Muhammad.³⁵ Dari situlah maka dimulailah pemerintahan nabi Muhammad.

Di masa pemerintahan nabi Muhammad, lembaga yang bertugas untuk mentertibkan hal-hal yang mengganggu

³⁴ Sadjijono, 61.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 38.

kepentingan masyarakat (*amar ma'ruf nahi munkar*) adalah *hisbah*. Lembaga ini tidak hanya menertibkan hal-hal yang mengganggu kepentingan masyarakat, akan tetapi juga mengadili pelaku pelanggaran tersebut.³⁶ Jadi pada masa nabi Muhammad, kekuasaan seorang hakim dan penjaga ketertiban ditangani oleh orang yang sama, yakni dipegang oleh kepala negara. Pada saat itu, Nabi sebagai seorang kepala Negara sekaligus menangani beberapa fungsi yang diantaranya adalah fungsi hakim dan fungsi *hisbah*.³⁷

Pada awal pemerintahannya, nabi memegang sendiri tugas *muhtasib* ini, namun ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin bertambah beliau menunjuk sahabat Ibnu al-Aṣ ibn Umayyah ra. untuk bertugas sebagai *muhtasib* di Makkah dan sahabat Umar bin Khaṭṭāb ra. ditugaskan di Madinah.³⁸ Tidak jarang Nabi saw. sendiri mengadakan inspeksi langsung ke tempat-tempat strategis. Contohnya, beliau saw. pernah melakukan inspeksi mendadak ke suatu pasar di Madinah. Dalam inspeksi ini, beliau saw. mendapatkan seorang pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah karena hujan dan mencampurnya dengan makanan yang kering di atasnya.³⁹

Sistem ini masih berlaku di masa pemerintahan *khalifah* Abu Bakar ra. Namun, seiring dengan semakin luasnya kekuasaan Islam, sistem pemerintahan pun berubah di masa *amīr al-mukminīn* Umar bin Khaṭṭāb ra.

Pada masa pemerintahannya, *amīr al-mukminīn* membentuk lembaga penting (departemen) yang di antaranya adalah Lembaga Kepolisian (*Dīwān al-Aḥdāth*), Lembaga Peradilan (*al-Qādy*), Departemen Pertahanan dan Keamanan (*Dīwān al-Jundy*), di mana Lembaga Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan berdirinya lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa pada masa *amīr al-mukminīn* telah

³⁶ Iqbal, 41.

³⁷ Akhmad Mubahidin, "Peran Negara dalam Hisbah," *Jurnal Al-Iqtishad* IV, no. 1 (Januari 2012): 144.

³⁸ Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, 11.

³⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 41.

terjadi pemilahan antara dua fungsi penegak hukum, yakni Lembaga Kepolisian, dengan Lembaga Peradilan.⁴⁰

Sistem kelembagaan ini masih belaku sampai pada masa pemerintahan *khalifah* 'Alī ra. Namun pada pemerintahan masa ini terdapat perkembangan, yakni telah disebarkan intel (mata-mata) di daerah-daerah. Tujuannya untuk menjaga keamanan daerah.⁴¹

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, *ḥisbah*⁴² berfungsi sebagai lembaga yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran ringan. Ini semisal kecurangan dalam perdagangan dan penipuan di pasar, maupun perkara yang berhubungan dengan *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah* (hukum perdata). Pejabat kepolisian (*ṣāhib syurṭah*) berada di daerah-daerah membantu gubernur dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.⁴³

Setelah terjadi perluasan daerah kekuasaan yang dipimpin oleh Bani Umayyah terdapat beberapa perubahan pada petugas penegak hukum di mana telah ada Kepala Kepolisian Daerah (Polda) yang disebut dengan *Imārah al-istilā'*. Ia bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban daerah. Selain itu, negara juga memiliki *kātib al-shurṭah* yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara secara umum (Departemen Kepolisian).⁴⁴

Dari gambaran di atas tampak bahwa di awal pemerintahan Islam yang dipimpin Nabi saw., di mana daerah kekuasaan Islam masih sedikit, tanggung jawab sebagai pengawas dan penegak hukum dipegang oleh khalifah. Namun seiring dengan perkembangan daerah kekuasaan Islam, berkembang pula sistem ketatanegaraannya. Seorang khalifah yang awalnya memegang berbagai fungsi kenegaraan selanjutnya semakin berkembang dengan dipilihnya para pejabat pemerintahan,

⁴⁰ Iqbal, 57.

⁴¹ Iqbal, 78.

⁴² Pada awal munculnya lembaga *ḥisbah*, lembaga ini berfungsi sebagai petugas *amar ma'rūf nahī munkar* (yang di dalamnya termasuk penjaga ketertiban masyarakat) serta sebagai lembaga peradilan.

⁴³ Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 82.

⁴⁴ Iqbal, 92.

yang akhirnya pada pemerintahan Dinasti Abasiyyah telah ada Departemen Kepolisian (*kātib al-shurṭah*), serta pada daerah-daerah telah ditempatkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang disebut dengan *Imārah Istīlāʾ*, yang bertugas menangani ketertiban dan keamanan daerah.⁴⁵

Tugas dan wewenang Lembaga Kepolisian di Indonesia

Harsja W. Bachtiar mengemukakan bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan, supaya masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan tenang dan tenteram.⁴⁶

Dalam penyelenggaraan kepolisian, Polri mempunyai beberapa tugas yang diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni Tugas Pokok Kepolisian dan Tugas Pembinaan. Mengenai Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002, tentang Polri, tugas pokok tersebut diklasifikasikan menjadi tiga yakni: memelihara keamanan dan ketertiban⁴⁷ masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketertiban masyarakat merupakan refleksi dari adanya keteraturan dan berfungsinya suatu tatanan yang dipatuhi oleh tiap-tiap individu dalam masyarakat. Dalam

⁴⁵ Iqbal, 93.

⁴⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, 120.

⁴⁷ Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepolisian perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*, Sadjijono mengartikan ketertiban sebagai suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Sedangkan Soebroto Broto Direjo mengartikan keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Lihat: Sadjijono, 121.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi perlu melakukan tugas preventif⁴⁸ dan represif⁴⁹.

Konsep dari tugas preventif adalah dengan pola pembinaan seperti pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tujuan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun tindakan preventif biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain sebagainya sebagai teknis dasar kepolisian.⁵⁰

Tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas ini merupakan tugas kepolisian di bidang peradilan dan penegak hukum yang dibebankan kepada petugas kepolisian. Mengenai tugas kepolisian, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa "Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu di satu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*)".⁵¹

Terkait dengan wewenang kepolisian, bahwa setelah munculnya Tab MPR No. VII/MPR/2002 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 6 (1) menyebutkan inti peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni:⁵² "Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Peran tersebut merupakan peran pokok yang diiringi dengan peran lain yang bersifat khusus yakni berkaitan dengan negara dalam keadaan darurat, keikutsertaannya sebagai Interpol dan perdamaian PBB, sebagaimana

⁴⁸ Preventif adalah upaya mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk berbuat jahat sehingga tidak terjadi kejahatan.

⁴⁹ Represif adalah upaya penanggulangan terhadap kejahatan atau penyimpangan perilaku sosial.

⁵⁰ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, 120.

⁵¹ Sadjijono, 121.

⁵² Sadjijono, 135.

dirumuskan dalam pasal 9 (1), (6) dan (3) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 yang substansinya sebagai berikut:⁵³

1. Apabila negara dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI.
2. Turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *Internasional Criminal Police Organization-Interpol*.
3. Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera PBB.

Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Definisi dari wewenang tersebut adalah:

1. Wewenang atribusi adalah wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh orang lain atas namanya.⁵⁴

Mengenai wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif antara lain adalah wewenang kepolisian yang telah dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan lain-lain. Adapun kewenangan delegasi dan mandat timbul dari adanya wewenang atributif, di mana pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat) maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.⁵⁵

Adapun perbedaan antara wewenang delegasi dan wewenang mandat adalah pada wewenang delegasi, pemberi delegasi (*delegator*) tidak lagi bertanggung jawab

⁵³ Sadjijono, 136.

⁵⁴ Sadjijono, 125.

⁵⁵ Rahardjo dan Angkasa, "Profesionalisme dalam Penegakan Hukum," 197.

atas wewenang yang didelegasikan dan tanggung jawab beralih sepenuhnya pada penerima wewenang (*delegatoir*), akan tetapi wewenang ini sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh pemberi wewenang. Sedangkan pada wewenang mandat, tanggung jawab dan wewenang masih melekat pada pemberi mandat, sehingga penerima mandat bertanggung jawab pada pemberi mandat.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian, Polri mempunyai beberapa wewenang, antara lain adalah:

1. Mengenai wewenang umum tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri meliputi: menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti; menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Mengenai wewenang khusus kepolisian meliputi wewenang penyelidikan dan penyidikan proses pidana, serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang penting juga, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya strategi Polri didasarkan pada pola pikir sebagai Polisi sipil (*civilian police*), yang merupakan wujud

perubahan paradigma dalam reformasi birokrasi Polri. Artinya ketika polisi melaksanakan pekerjaannya haruslah dengan cara-cara yang tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Di sinilah lalu muncul Polisi sipil sebagai *human policing*, di mana memandang, menempatkan, dan mengakui bahwa orang-orang yang dihadapi dan ditemui dalam pekerjaannya sebagai insan dengan pribadi yang utuh dan penuh.⁵⁶

Tugas dan Wewenang Lembaga Kepolisian dalam Tatanegara Islam

Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas *muhtasib* adalah *amar ma'rūf nahī munkar*.⁵⁷ Dalam penegakan hukum, lembaga *hisbah* berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang *amar ma'rūf nahī munkar*.⁵⁸

Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga *hisbah* ini adalah QS. Āli 'Imrān (3): 104, yang artinya "*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'rūf dan melarang yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung*."⁵⁹

Adapun tugas dari lembaga *hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas *hisbah*, mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum

⁵⁶ Sukardi, "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi," 446-47.

⁵⁷ Lucky Enggrani Fitri, "Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar," *Jurnal Mankue* 1, no. 1 (2012): 66.

⁵⁸ Mujahidin, "Peran Negara dalam Hisbah," 144.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 93.

positif dan norma-norma kesusilaan.⁶⁰ Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk.⁶¹ Selain itu *muhtasib* bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.⁶²

Meskipun pada umumnya tugas *muhtasib* adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, namun terdapat perbedaan dengan orang yang bertindak atas sukarela, yaitu:⁶³

1. Menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu kewajiban (*farḍu 'ain*) bagi *muhtasib* karena ia diangkat untuk hal itu. Sedangkan untuk orang lain merupakan *farḍu kifāyah*.
2. *Muhtasib* adalah orang yang ditugaskan untuk bertindak atas orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberi bantuan bagi orang yang membutuhkan bantuannya. Sedangkan orang yang bertindak secara sukarela tidak diharuskan kecuali dalam keadaan darurat.
3. *Muhtasib* harus membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran yang nyata untuk mencegah terjadinya perbuatan itu, sebagaimana dia harus memeriksa perbuatan-perbuatan *ma'rūf* yang tidak dikerjakan oleh orang yang harus mengerjakan. Seperti Shalat Jum'at bagi orang yang tidak melaksanakannya akan mendapat peringatan.
4. *Muhtasib* dapat mengangkat beberapa pegawai untuk menjalankan tugas *hisbah* dan dia diberi hak untuk menjalankan hukuman *ta'zīr* terhadap orang-orang yang mengadakan kemungkaran.

⁶⁰ Muhammad Hasbi Assidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), 96.

⁶¹ Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, 13-14.

⁶² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 41.

⁶³ Assidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 96.

Secara teknis, *muhtasib* dapat menunjuk staf ahli yang bertugas untuk mengawasi hubungan antar berbagai profesi dan perdagangan. *Muhtasib* juga menerima pengaduan dari publik, namun dapat juga mengambil inisiatifnya sendiri. Ia berwenang untuk melakukan sejumlah langkah yang dapat diambil dalam melaksanakan tugasnya. Langkah-langkah tersebut dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa, ancaman, penjara dan pengusiran dari kota. *Muhtasib* hanya diperbolehkan memilih sanksi terkeras ketika sanksi yang lebih ringan tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.⁶⁴

Muhtasib merupakan lembaga pengawas dan pengendali. Ia merupakan alat penegak hukum, sehingga ia dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang jika orang tersebut benar-benar telah melanggar hukum yang berlaku atau *ijma'* tentang larangan-larangan perbuatan tersebut.⁶⁵

Dari penjelasan tersebut tampak meskipun kepolisian dalam Islam dan Polri mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas daripada Polri.

Apapun itu, bahwa pada intinya kejahatan hanyalah membawa penderitaan dan kesengsaraan, serta menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada penanggulangan terhadap kejahatan. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan beberapa dampak buruk. Antara lain: *pertama*, berakibat meningkatnya kejahatan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. *Kedua*, berdampak memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar perhitungan umat manusia, yang bisa saja merupakan derivasi dari "kejahatan konservatif". Dan, *ketiga*,

⁶⁴ Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, 14.

⁶⁵ Mujahidin, "Peran Negara dalam Hisbah," 147.

berdampak pada tidak dapat teridentifikasinya sebuah kejahatan sebagai kejahatan.⁶⁶

Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam konteks Hukum Tata Negara Islam dikenal istilah *muhtasib*, yang merupakan lembaga pengawas dan pengendali. Ia merupakan alat penegak hukum, sehingga ia dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang jika orang tersebut benar-benar telah melanggar hukum yang berlaku atau *ijma'* tentang larangan-larangan perbuatan tersebut.
3. Kepolisian dalam Islam dan Polri mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas daripada Polri.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi. *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Anam, Ach Choirul. "Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Prespektif Maqasid al-Syari'ah." *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Assidiqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.

⁶⁶ Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam*, 2-3.

- Fitri, Lucky Enggrani. "Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar." *Jurnal Mankue* 1, no. 1 (2012).
- Halim, Marah. "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* X, no. 2 (Pebruari 2012).
- Hartono, R. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Istambuli, Mahmud Mahdi al-. *Wanita-wanita Sholihah dalam Cahaya Kenabian*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam Prespektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . "Pidana Qiṣās dalam Prespektif Penologi." *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (Desember 2017).
- Mujahidin, Akhmad. "Peran Negara dalam Hisbah." *Jurnal Al-Iqtishad* IV, no. 1 (Januari 2012).
- Rahardjo, Agus, dan Angkasa. "Profesionalisme dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (September 2011).
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006.
- Samego, Indria, ed. *Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Bandung: Mizan Pustaka, t.t.
- Singh, Billveer. *Dwi Fungsi ABRI: Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Siregar, Sarah Nuraini. "Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri." *Jurnal Penelitian Politik* 5, no. 1 (2008).
- . "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)." *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (Juni 2014).
- Sukardi. "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 4 (2016).
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin Dzofir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.